



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

Jalan Syech Nawawi Al-Bantani Nomor 3, Km. 5. Telp (0254) 214085 Kota Serang, Banten 42123
www.ptun-serang.go.id, e-mail: informasi@ptun-serang.go.id

Nomor : 1120 /KPTUN.W2-TUN3/RA1.8/VII/2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Laporan Monitoring dan Evaluasi
Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Serang, 31 Juli 2026

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
di -
Jalan Cikini Raya Nomor 117 Jakarta Pusat

Dengan hormat,

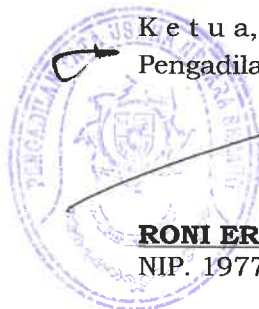
Bersama ini kami sampaikan Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai bentuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja organisasi serta implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Laporan ini memuat hasil monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada bidang kepaniteraan dan kesekretariatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk menilai tingkat ketercapaian sasaran kinerja beserta indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab masing-masing unit kerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu, laporan ini juga menyajikan analisis terhadap capaian kinerja, identifikasi permasalahan dan risiko, evaluasi hambatan yang dihadapi, serta rekomendasi dan tindak lanjut sebagai dasar pengendalian dan peningkatan kinerja organisasi pada triwulan berikutnya.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk menjadi bahan monitoring dan evaluasi. Atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang



RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H.
NIP. 19770628 200112 1 003

Tembusan :

- Arsip.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

Jalan Syech Nawawi Al-Bantani Nomor 3, Km. 5. Telp (0254) 214085 Kota Serang, Banten 42123
www.ptun-serang.go.id, e-mail: informasi@ptun-serang.go.id

Nomor : 1120/SEK.PTUN.W2-TUN3/RA1.8/VII/2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Laporan Monitoring dan Evaluasi
Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Serang, 31 Juli 2026

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
di -
S e r a n g

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan monitoring dan evaluasi capaian kinerja Triwulan II Tahun 2026 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, bersama ini kami sampaikan Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, serta capaian kinerja organisasi.

Laporan ini memuat hasil monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada bidang kepaniteraan dan kesekretariatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk menilai tingkat ketercapaian sasaran kinerja beserta indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab masing-masing unit kerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu, laporan ini juga menyajikan analisis terhadap capaian kinerja, identifikasi permasalahan dan risiko, evaluasi hambatan yang dihadapi, serta rekomendasi dan tindak lanjut sebagai dasar pengendalian dan peningkatan kinerja organisasi pada triwulan berikutnya.

Demikian surat pengantar ini disampaikan. Atas perhatian dan arahnya diucapkan terima kasih.

Sekretaris,
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

TAUFIK RAHMAN, S.Sos., M.M.
NIP. 19780509 200604 1 002

Tembusan :

1. Wakil Ketua PTUN Serang;
2. Panitera PTUN Serang;
3. Arsip.



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

DITJEN BADILMILTUN

PENGADILAN TINGGI TUN JAKARTA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

TRIWULAN II TAHUN 2026



INTEGRITAS



PROFESIONAL



AKUNTABEL



KOLABORATIF



Jl. Syech Nawawi Albantani No.3
Km.5 Banjarsari, Cipocok Jaya
Kota Serang 42123



www.ptun-serang.go.id



(0254) 214085

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja periode Triwulan II Tahun 2026 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dapat disusun dengan baik.

Laporan ini merupakan salah satu bentuk implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sekaligus sebagai instrumen pengendalian internal dalam rangka memastikan pelaksanaan Perjanjian Kinerja berjalan sesuai dengan sasaran strategis, indikator kinerja, serta target yang telah ditetapkan. Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi, perkembangan capaian kinerja organisasi dapat diketahui secara berkala, sehingga berbagai potensi permasalahan dapat diidentifikasi lebih dini dan segera ditindaklanjuti melalui langkah-langkah perbaikan yang tepat.

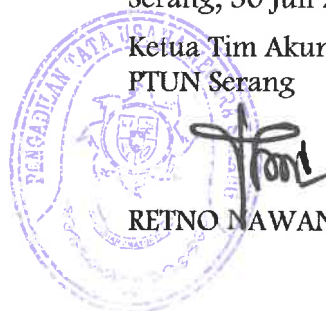
Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan pelaksanaan Perjanjian Kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, melakukan analisis terhadap capaian indikator kinerja, mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi, serta menyusun tindak lanjut dan rencana aksi sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan masih dapat terus dikembangkan. Oleh karena itu, saran, masukan, dan rekomendasi dari berbagai pihak sangat diharapkan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pada periode berikutnya.

Akhirnya, kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi, pengambilan keputusan, serta penguatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta mendukung terwujudnya badan peradilan yang agung.

Serang, 30 Juli 2026

Ketua Tim Akuntabilitas
PTUN Serang

The image shows a circular official stamp of the Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang. The stamp contains the text 'PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG' around the perimeter and 'PTUN SERANG' in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

RETNO NAWANGSIH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	2
D. Ruang Lingkup	2
BAB II GAMBARAN UMUM KINERJA ORGANISASI	
A. Sasaran Strategis	4
B. Pendekatan Monitoring dan Evaluasi	4
C. Metode Evaluasi	5
BAB III HASIL MONITORING DAN EVALUASI KINERJA	
A. Kinerja Kepaniteraan	7
B. Tingkat Kepuasan dan Kepercayaan Publik	8
C. Kinerja Kesekretariatan	9
BAB IV ANALISIS CAPAIAN KINERJA	
A. Analisis Umum Hasil Monitoring dan Evaluasi	13
B. Analisis Efektivitas Tindak Lanjut Monitoring Triwulan I	13
C. Analisis Kinerja Kepaniteraan	14
D. Analisis Kepuasan Masyarakat	16
E. Analisis Kinerja Kesekretariatan	17
F. Analisis Risiko dan Pengendalian Kinerja	20
J. Proyeksi Kinerja Triwulan III	21
BAB V PERMASALAHAN, HAMBATAN, TINDAK LANJUT DAN RENCANA AKSI	
A. Permasalahan dan Hambatan	23
B. Upaya Perbaikan dan Pengendalian	23
C. Rencana Aksi Peningkatan Kinerja Triwulan II	25
D. Rekomendasi	26
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	29
B. Penutup	30
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta mendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pengadilan Tata Usaha Negara Serang secara berkesinambungan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja organisasi berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Monitoring dan evaluasi tersebut merupakan bagian dari proses pengendalian manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program, kegiatan, dan penggunaan sumber daya telah berjalan secara efektif, efisien, transparan, serta akuntabel.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja Triwulan II Tahun 2026 difokuskan pada pengukuran tingkat pencapaian sasaran strategis, indikator kinerja utama, indikator kinerja pendukung, serta capaian pelaksanaan program dan kegiatan baik pada unsur kepaniteraan maupun kesekretariatan. Selain itu, monitoring juga dilakukan terhadap kualitas pelaksanaan anggaran melalui indikator Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA), capaian Rincian Output (RO), pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pelayanan publik, serta pelaksanaan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi Triwulan I Tahun 2026. Hal ini sejalan dengan tindak lanjut yang telah disusun dalam Laporan Monitoring Rencana Aksi periode Triwulan II.

Hasil monitoring Triwulan II menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja organisasi telah berjalan sesuai target yang ditetapkan. Beberapa indikator bahkan menunjukkan peningkatan dibandingkan Triwulan I, seperti capaian IKPA DIPA 01 yang mencapai kategori sangat baik, optimalisasi pelaksanaan Rincian Output (RO) pada DIPA 01, serta tingkat kepuasan masyarakat yang tetap berada pada kategori sangat baik. Di sisi lain, masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian, khususnya pada pelaksanaan DIPA 05, kualitas perencanaan anggaran, dan optimalisasi beberapa indikator pendukung yang belum sepenuhnya tercapai. Hal ini menjadi dasar dalam penyusunan langkah perbaikan dan strategi peningkatan kinerja pada Triwulan III.

Melalui penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai tingkat efektivitas pelaksanaan program, capaian indikator kinerja, kualitas pelaksanaan anggaran, serta efektivitas tindak lanjut atas rekomendasi hasil monitoring sebelumnya. Laporan ini juga menjadi salah satu instrumen pengendalian internal yang digunakan sebagai bahan evaluasi oleh pimpinan dalam rangka

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	2
D. Ruang Lingkup	2
BAB II GAMBARAN UMUM KINERJA ORGANISASI	
A. Sasaran Strategis	4
B. Pendekatan Monitoring dan Evaluasi	4
C. Metode Evaluasi	5
BAB III HASIL MONITORING DAN EVALUASI KINERJA	
A. Kinerja Kepaniteraan	7
B. Tingkat Kepuasan dan Kepercayaan Publik	8
C. Kinerja Kesekretariatan	9
BAB IV ANALISIS CAPAIAN KINERJA	
A. Analisis Umum Hasil Monitoring dan Evaluasi	13
B. Analisis Efektivitas Tindak Lanjut Monitoring Triwulan I	13
C. Analisis Kinerja Kepaniteraan	14
D. Analisis Kepuasan Masyarakat	16
E. Analisis Kinerja Kesekretariatan	17
F. Analisis Risiko dan Pengendalian Kinerja	20
J. Proyeksi Kinerja Triwulan III	21
BAB V PERMASALAHAN, HAMBATAN, TINDAK LANJUT DAN RENCANA AKSI	
A. Permasalahan dan Hambatan	23
B. Upaya Perbaikan dan Pengendalian	23
C. Rencana Aksi Peningkatan Kinerja Triwulan II	25
D. Rekomendasi	26
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	29
B. Penutup	30
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta mendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pengadilan Tata Usaha Negara Serang secara berkesinambungan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja organisasi berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Monitoring dan evaluasi tersebut merupakan bagian dari proses pengendalian manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program, kegiatan, dan penggunaan sumber daya telah berjalan secara efektif, efisien, transparan, serta akuntabel.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja Triwulan II Tahun 2026 difokuskan pada pengukuran tingkat pencapaian sasaran strategis, indikator kinerja utama, indikator kinerja pendukung, serta capaian pelaksanaan program dan kegiatan baik pada unsur kepaniteraan maupun kesekretariatan. Selain itu, monitoring juga dilakukan terhadap kualitas pelaksanaan anggaran melalui indikator Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA), capaian Rincian Output (RO), pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pelayanan publik, serta pelaksanaan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi Triwulan I Tahun 2026. Hal ini sejalan dengan tindak lanjut yang telah disusun dalam Laporan Monitoring Rencana Aksi periode Triwulan II.

Hasil monitoring Triwulan II menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja organisasi telah berjalan sesuai target yang ditetapkan. Beberapa indikator bahkan menunjukkan peningkatan dibandingkan Triwulan I, seperti capaian IKPA DIPA 01 yang mencapai kategori sangat baik, optimalisasi pelaksanaan Rincian Output (RO) pada DIPA 01, serta tingkat kepuasan masyarakat yang tetap berada pada kategori sangat baik. Di sisi lain, masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian, khususnya pada pelaksanaan DIPA 05, kualitas perencanaan anggaran, dan optimalisasi beberapa indikator pendukung yang belum sepenuhnya tercapai. Hal ini menjadi dasar dalam penyusunan langkah perbaikan dan strategi peningkatan kinerja pada Triwulan III.

Melalui penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai tingkat efektivitas pelaksanaan program, capaian indikator kinerja, kualitas pelaksanaan anggaran, serta efektivitas tindak lanjut atas rekomendasi hasil monitoring sebelumnya. Laporan ini juga menjadi salah satu instrumen pengendalian internal yang digunakan sebagai bahan evaluasi oleh pimpinan dalam rangka

peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengatur mengenai organisasi dan tata kerja kepaniteraan serta kesekretariatan pengadilan.
8. Dokumen Renstra Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025–2029.
9. Perjanjian Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2026.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan laporan ini adalah sebagai bentuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pencapaian Perjanjian Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Triwulan II Tahun 2026 guna memastikan bahwa pelaksanaan program, kegiatan, dan penggunaan anggaran telah berjalan sesuai sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah:

1. Mengukur tingkat pencapaian indikator kinerja pada Triwulan II Tahun 2026.
2. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program, kegiatan, dan penggunaan anggaran.
3. Mengidentifikasi kendala dan faktor yang memengaruhi pencapaian kinerja.
4. Mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi Triwulan I Tahun 2026.
5. Menyusun rekomendasi dan langkah perbaikan sebagai dasar peningkatan kinerja pada Triwulan III Tahun 2026.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup monitoring dan evaluasi dalam laporan ini meliputi:

1. Capaian indikator kinerja kepaniteraan.
2. Capaian indikator kinerja kesekretariatan.

3. Capaian pelaksanaan anggaran, meliputi IKPA, NKPA, Rincian Output (RO), dan indikator pendukung lainnya.
4. Capaian pelayanan publik dan tingkat kepuasan masyarakat.
5. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).
6. Monitoring pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi Triwulan I Tahun 2026.
7. Analisis permasalahan, hambatan, risiko, serta rekomendasi perbaikan untuk Triwulan III.

BAB II

GAMBARAN UMUM KINERJA ORGANISASI

A. Sasaran Strategis

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki komitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang agung melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan administrasi peradilan yang efektif, serta tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut telah ditetapkan sasaran strategis yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan seluruh program dan kegiatan selama Tahun 2026.

Pelaksanaan sasaran strategis tersebut dijabarkan ke dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang memuat indikator-indikator kinerja utama sebagai ukuran keberhasilan organisasi. Indikator tersebut mencakup aspek penyelesaian perkara, pelayanan kepada para pencari keadilan, pengelolaan administrasi perkara, kualitas pelaksanaan anggaran, profesionalisme aparatur, serta tata kelola organisasi yang baik. Seluruh indikator tersebut dimonitor secara berkala untuk memastikan tingkat ketercapaian target yang telah ditetapkan.

Pada Triwulan II Tahun 2026, monitoring terhadap sasaran strategis dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab unsur kepaniteraan maupun kesekretariatan. Selain mengukur capaian indikator kinerja utama, evaluasi juga dilakukan terhadap indikator pendukung yang berpengaruh terhadap efektivitas penyelenggaraan organisasi, antara lain Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA), capaian Rincian Output (RO), pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), serta hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Data tersebut menjadi dasar dalam menilai tingkat keberhasilan organisasi selama periode Triwulan II.

B. Pendekatan Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dilaksanakan secara berkala sebagai bagian dari siklus pengendalian kinerja organisasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Perjanjian Kinerja dapat dilaksanakan sesuai target, sekaligus mengidentifikasi hambatan yang berpotensi memengaruhi pencapaian sasaran strategis.

Pelaksanaan monitoring pada Triwulan II tidak hanya berfokus pada pengukuran capaian indikator, tetapi juga mengevaluasi efektivitas tindak lanjut atas rekomendasi hasil Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi telah ditindaklanjuti secara optimal sehingga

mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan pada periode berjalan. Hal ini tercermin dalam pelaksanaan monitoring terhadap percepatan capaian Rincian Output (RO), peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran, penguatan pengendalian penyelesaian perkara, peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital, pengelolaan BMN, serta penguatan pengendalian internal organisasi.

Dalam pelaksanaannya, monitoring dilakukan melalui koordinasi antara pimpinan, kepaniteraan, kesekretariatan, serta unit-unit pelaksana kegiatan. Data yang digunakan berasal dari berbagai aplikasi dan sistem informasi resmi, antara lain aplikasi SAKTI, OM-SPAN, aplikasi NKPA, e-Monev internal, SIPP, serta hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan laporan pengelolaan BMN. Seluruh data kemudian dianalisis untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan selama Triwulan II.

C. Metode Evaluasi

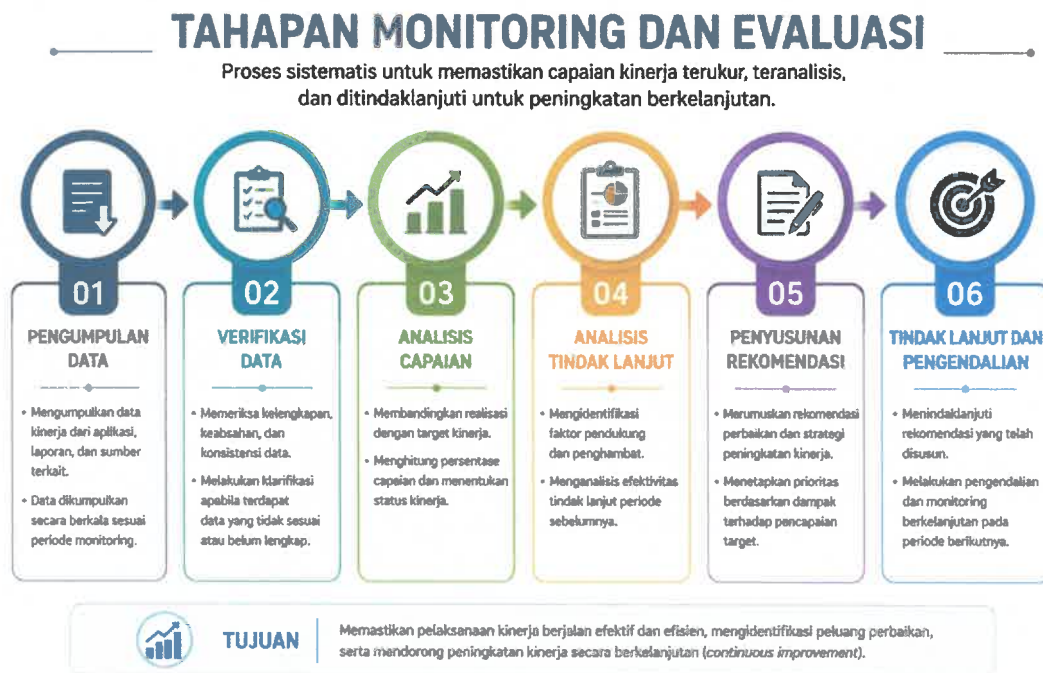
Evaluasi capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif-komparatif, yaitu membandingkan antara target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dengan realisasi capaian sampai dengan akhir Triwulan II. Hasil perbandingan tersebut selanjutnya dianalisis untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan program, kualitas pencapaian indikator, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaannya.

Metode evaluasi dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. **Pengumpulan Data**, yaitu menghimpun data capaian indikator kinerja dari seluruh unit kerja berdasarkan hasil monitoring Triwulan II.
2. **Verifikasi Data**, yaitu memastikan kesesuaian data dengan dokumen pendukung, aplikasi pengukuran kinerja, dan laporan pelaksanaan kegiatan.
3. **Analisis Capaian Kinerja**, yaitu membandingkan target dan realisasi setiap indikator untuk mengetahui tingkat ketercapaian sasaran strategis.
4. **Analisis Efektivitas Tindak Lanjut**, yaitu mengevaluasi pelaksanaan rencana aksi yang telah disusun berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Triwulan I serta dampaknya terhadap peningkatan capaian kinerja pada Triwulan II.
5. **Penyusunan Rekomendasi**, yaitu merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan sebagai dasar peningkatan kinerja pada Triwulan III Tahun 2026.

Melalui metode tersebut diharapkan hasil evaluasi tidak hanya menggambarkan tingkat ketercapaian indikator kinerja, tetapi juga memberikan informasi mengenai efektivitas pelaksanaan program, kualitas pengelolaan anggaran, pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi sebelumnya, serta strategi peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Gambar 2.1 Infografis Tahapan Monitoring dan Evaluasi



BAB III

HASIL MONITORING DAN EVALUASI KINERJA

A. Kinerja Kepaniteraan

Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja kepaniteraan pada Triwulan II Tahun 2026 dilaksanakan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Pengukuran dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian sasaran strategis pada bidang teknis peradilan, khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian perkara, ketepatan waktu pelayanan administrasi perkara, pelaksanaan persidangan secara elektronik, penyampaian salinan putusan, pengiriman pemberitahuan putusan, penyelesaian permohonan eksekusi serta perkara yang menggunakan *e-Court*.

Tabel 3.1 Rekapitulasi Capaian Kinerja pada Sasaran Kinerja 1 : Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			Rata-Rata Realisasi	Capaian	Capaian SasKin 1
			Apr	Mei	Jun			
1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	91	0	n/a	100	50,00	54,95	90,99
1.2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	100	100	n/a	100,00	100,00	
1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100	100	100,00	100,00	
1.4	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100	100	100,00	100,00	
1.5	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	90	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
1.6	Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100	100	100	100	100,00	100,00	

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, Sasaran Kinerja 1 memperoleh capaian sebesar 90,99%, yang menunjukkan bahwa secara umum sasaran strategis masih berada pada kategori baik karena telah memenuhi target minimal kinerja organisasi. Capaian tersebut merupakan hasil akumulasi dari enam indikator kinerja yang mengukur aspek penyelesaian perkara, pelayanan administrasi perkara, publikasi putusan, pelaksanaan eksekusi, serta implementasi layanan peradilan berbasis elektronik.

Dari enam indikator yang diukur, empat indikator berhasil mencapai nilai maksimal sebesar 100%, yaitu:

- Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan kepada para pihak secara tepat waktu;
- Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali secara tepat waktu;
- Persentase putusan yang diunggah pada Direktori Putusan;

- Persentase perkara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan layanan e-Court.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan administrasi perkara, keterbukaan informasi melalui publikasi putusan, serta implementasi pelayanan peradilan berbasis elektronik telah berjalan secara optimal dan konsisten sesuai target yang ditetapkan.

Namun demikian, terdapat satu indikator yang memerlukan perhatian khusus, yaitu Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu, yang hanya mencapai 54,95% terhadap target 91%. Rendahnya capaian indikator ini menjadi faktor utama yang memengaruhi penurunan capaian Sasaran Kinerja 1 secara keseluruhan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat perkara yang penyelesaiannya melampaui standar waktu yang telah ditetapkan sehingga diperlukan langkah-langkah pengendalian yang lebih intensif pada periode berikutnya.

Sementara itu, indikator Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara belum dapat diukur karena tidak terdapat permohonan eksekusi selama periode Triwulan II Tahun 2026. Oleh karena itu, indikator tersebut tidak memengaruhi perhitungan capaian sasaran kinerja.

Secara keseluruhan, hasil monitoring menunjukkan bahwa kualitas pelayanan administrasi perkara dan pemanfaatan layanan peradilan elektronik telah terlaksana dengan sangat baik. Akan tetapi, optimalisasi penyelesaian perkara tepat waktu perlu menjadi fokus pengendalian pada Triwulan III melalui peningkatan monitoring terhadap perkara yang mendekati batas waktu penyelesaian, evaluasi terhadap faktor-faktor penyebab keterlambatan, serta penguatan koordinasi antara Majelis Hakim dan Kepaniteraan. Dengan langkah tersebut diharapkan capaian indikator penyelesaian perkara tepat waktu dapat meningkat sehingga capaian Sasaran Kinerja 1 pada akhir Tahun 2026 dapat lebih optimal.

Secara umum, Sasaran Kinerja 1 menunjukkan kinerja yang baik dengan capaian sebesar 90,99%. Keberhasilan mempertahankan capaian maksimal pada empat indikator utama menunjukkan konsistensi kualitas pelayanan administrasi perkara dan implementasi layanan berbasis elektronik. Namun demikian, peningkatan persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu menjadi prioritas utama pada Triwulan III karena indikator tersebut merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap capaian sasaran kinerja secara keseluruhan.

B. Tingkat Kepuasan dan Kepercayaan Publik

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan publik pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah Tingkat Kepuasan dan Kepercayaan Publik, yang diukur melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Berdasarkan hasil monitoring sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, indikator tersebut telah mencapai **101,03%** dari target yang ditetapkan, sehingga menunjukkan bahwa target kinerja telah tercapai dengan sangat baik.

Tabel 3.2 Capaian Kinerja pada Sasaran Kinerja 2 : Meningkatnya Keyakinan dan Kepercayaan Publik

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		Rata-Rata Realisasi	Capaian SasKin 2
			Triwulan II			
2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	98	IKM	98,49	99,01	101,03
			IPAK	99,52		

Capaian tersebut didukung oleh hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang memperoleh Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 99,01 dengan kategori Sangat Baik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan telah memenuhi harapan masyarakat, baik dari aspek persyaratan, prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, kompetensi petugas, perilaku petugas, maupun pemanfaatan layanan berbasis elektronik. Kondisi ini juga mencerminkan efektivitas berbagai inovasi pelayanan yang telah dikembangkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Selain keberhasilan dalam mencapai target kinerja, hasil monitoring juga menunjukkan bahwa tindak lanjut terhadap saran dan masukan masyarakat terus dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penyempurnaan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Dengan demikian, tingkat kepuasan dan kepercayaan publik diharapkan tetap terjaga serta mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan peradilan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

C. Kinerja Kesekretariatan

Monitoring terhadap kinerja kesekretariatan dilaksanakan melalui pengukuran capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, meliputi pelaksanaan anggaran, kinerja perencanaan anggaran, serta pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Hasil monitoring selanjutnya dianalisis dengan menggunakan indikator pendukung sebagai dasar untuk menilai perkembangan capaian sampai dengan Triwulan II Tahun 2026.

Tabel 3.3. Capaian Sasaran Kinerja 3: Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target (%)	Nilai Realisasi adalah nilai pelaporan bulan terakhir	Capaian
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	81	80,21	99,02
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA-01	96	99,96	104,13
		3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA-05	95	88,37	93,02
		3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA-01	96	91,25	95,05
		3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA-05	91	19,38	21,30
		3.6 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	2,31	77,00

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, pelaksanaan indikator kinerja pada bidang kesekretariatan menunjukkan hasil yang cukup baik. Dari enam indikator yang diukur, tiga indikator telah mencapai atau melampaui target yang ditetapkan, satu indikator berada sangat dekat dengan target, sedangkan dua indikator lainnya masih memerlukan perhatian dan penguatan agar target kinerja tahunan dapat dicapai secara optimal.

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) memperoleh nilai realisasi sebesar 80,21 dengan capaian 99,02% terhadap target 81. Capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat profesionalitas ASN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah berada pada kategori yang sangat baik dan relatif stabil. Meskipun belum mencapai nilai target secara penuh, selisih yang sangat kecil menunjukkan bahwa pembinaan kompetensi, pengelolaan data kepegawaian, dan pengembangan aparatur telah berjalan secara efektif. Upaya pemutakhiran data ASN dan peningkatan kompetensi tetap perlu dilanjutkan untuk mempertahankan bahkan meningkatkan capaian pada periode berikutnya.

Pada aspek pelaksanaan anggaran, IKPA DIPA-01 menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan nilai realisasi 99,96 atau mencapai 104,13% dari target 96. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan anggaran DIPA-01 telah dilaksanakan secara efektif, baik dari sisi kepatuhan administrasi maupun kualitas pengelolaan anggaran. Sebaliknya, IKPA DIPA-05 memperoleh nilai realisasi 88,37 atau 93,02% terhadap target 95. Walaupun belum memenuhi target, capaian tersebut masih menunjukkan perkembangan yang baik dan diperkirakan dapat meningkat seiring

percepatan pelaksanaan kegiatan pada semester kedua, mengingat sebagian besar kegiatan DIPA-05 memang terealisasi secara bertahap sesuai jadwal pelaksanaan.

Pada indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA), terdapat perbedaan capaian yang cukup signifikan antara DIPA-01 dan DIPA-05. NKPA DIPA-01 memperoleh nilai realisasi 91,25 dengan capaian 95,05%, sehingga menunjukkan bahwa kualitas perencanaan anggaran DIPA-01 telah berjalan dengan baik dan mendekati target yang ditetapkan. Sementara itu, NKPA DIPA-05 baru mencapai nilai realisasi 19,38 atau 21,30% terhadap target 91. Rendahnya capaian tersebut bukan semata-mata mencerminkan rendahnya kinerja, melainkan dipengaruhi oleh karakteristik perhitungan NKPA yang bersifat kumulatif, karena dibentuk oleh beberapa komponen penilaian, antara lain perkembangan Rincian Output (RO), penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK), efisiensi terhadap pagu SBK, serta indikator pembentuk lainnya yang akan berkembang seiring peningkatan realisasi kegiatan hingga akhir tahun anggaran. Oleh karena itu, peningkatan nilai NKPA masih sangat bergantung pada percepatan pelaksanaan kegiatan dan optimalisasi seluruh komponen pembentuknya pada Triwulan III dan Triwulan IV.

Adapun pada indikator Indeks Pengelolaan Aset (IPA), nilai realisasi mencapai 2,31 dari target indeks 3 (skala maksimum 4), dengan capaian sebesar 77,00%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat ruang untuk peningkatan, khususnya pada aspek penatausahaan, pemutakhiran data aset, inventarisasi BMN, serta penyelesaian tindak lanjut hasil monitoring pengelolaan aset. Penguatan pada aspek tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola BMN sekaligus mendorong peningkatan nilai IPA pada akhir tahun.

Secara keseluruhan, hasil monitoring menunjukkan bahwa bidang kesekretariatan telah berhasil mempertahankan kinerja yang baik pada aspek profesionalitas aparatur dan pelaksanaan anggaran DIPA-01. Namun demikian, perhatian utama pada Triwulan III perlu difokuskan pada percepatan pelaksanaan kegiatan DIPA-05, optimalisasi seluruh komponen pembentuk NKPA, serta peningkatan kualitas pengelolaan BMN agar seluruh indikator dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

Secara umum, Sasaran Kinerja 3 menunjukkan perkembangan yang positif. Dari enam indikator yang diukur:

- 2 indikator telah melampaui target, yaitu IKPA DIPA-01 dan secara praktis IP ASN yang hampir memenuhi target dengan capaian 99,02%.
- 1 indikator mendekati target, yaitu NKPA DIPA-01 dengan capaian 95,05%.
- 2 indikator masih memerlukan percepatan, yaitu IKPA DIPA-05 dan terutama NKPA DIPA-05, yang dipengaruhi oleh progres pelaksanaan kegiatan dan sifat kumulatif komponen penilaiannya.

- 1 indikator masih perlu ditingkatkan, yaitu Indeks Pengelolaan Aset (IPA), melalui penguatan tata kelola Barang Milik Negara.

Dengan kondisi tersebut, fokus pengendalian pada Triwulan III diarahkan pada percepatan realisasi kegiatan DIPA-05, peningkatan kualitas perencanaan anggaran, optimalisasi komponen pembentuk NKPA, serta penguatan pengelolaan BMN. Sementara itu, capaian yang telah baik pada IP ASN, IKPA DIPA-01, dan NKPA DIPA-01 perlu dipertahankan melalui monitoring dan evaluasi berkala agar tetap konsisten hingga akhir tahun anggaran.

BAB IV

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

A. Analisis Umum Hasil Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa pelaksanaan Perjanjian Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang secara umum berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagian besar indikator kinerja menunjukkan perkembangan yang positif dan berada pada jalur pencapaian target tahunan.

Dibandingkan dengan hasil monitoring Triwulan I, terdapat peningkatan pada beberapa aspek pelaksanaan program dan kegiatan, khususnya kualitas pelaksanaan anggaran DIPA 01, perkembangan capaian Rincian Output (RO), serta konsistensi penyelenggaraan pelayanan publik dan pelayanan peradilan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tindak lanjut atas rekomendasi hasil monitoring Triwulan I telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pelaksanaan kinerja organisasi.

Meskipun demikian, hasil monitoring juga menunjukkan bahwa beberapa indikator masih berada pada tahap perkembangan karena karakteristik penilaiannya bersifat kumulatif hingga akhir tahun anggaran. Oleh karena itu, evaluasi pada Triwulan II lebih diarahkan pada perkembangan indikator pembentuk serta efektivitas pengendalian yang telah dilakukan sebagai dasar penyusunan langkah perbaikan pada periode berikutnya.

B. Analisis Efektivitas Tindak Lanjut Monitoring Triwulan I

Salah satu tujuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah memastikan bahwa setiap rekomendasi hasil monitoring sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif. Berdasarkan hasil evaluasi Triwulan II, sebagian besar tindak lanjut yang direncanakan telah dilaksanakan sesuai jadwal dan memberikan dampak terhadap peningkatan pelaksanaan program maupun kegiatan.

Pada bidang kepaniteraan, penguatan monitoring penyelesaian perkara mampu menjaga stabilitas pencapaian indikator pelayanan peradilan. Pada bidang kesekretariatan, monitoring pelaksanaan anggaran secara berkala mendorong peningkatan kualitas pengendalian pelaksanaan kegiatan, khususnya pada DIPA 01 yang memperoleh nilai IKPA sangat baik.

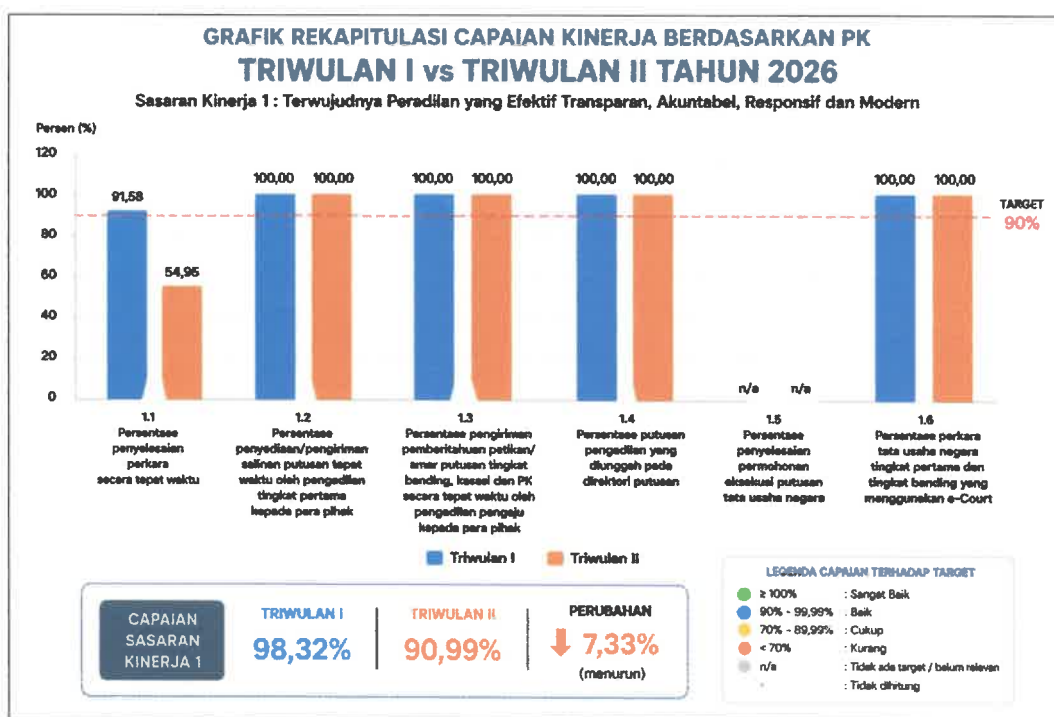
Pelaksanaan monitoring bulanan dan evaluasi triwulanan terbukti memberikan informasi yang lebih dini terhadap perkembangan indikator sehingga langkah korektif dapat segera dilakukan sebelum mempengaruhi pencapaian target tahunan.

C. Analisis Kinerja Kepaniteraan

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa indikator kinerja pada bidang kepaniteraan masih berada pada kondisi yang baik. Pengendalian terhadap penyelesaian perkara, penyampaian salinan putusan, pemberitahuan putusan, dan pelayanan administrasi perkara telah berjalan sesuai mekanisme yang ditetapkan.

Keberhasilan tersebut didukung oleh monitoring berkala terhadap perkembangan penyelesaian perkara sehingga potensi keterlambatan dapat diantisipasi lebih awal. Sampai dengan Triwulan II belum terdapat kondisi yang berpotensi mengganggu pencapaian target tahunan.

Fokus pengendalian pada Triwulan III diarahkan untuk mempertahankan konsistensi pelayanan serta mengantisipasi kemungkinan peningkatan jumlah perkara yang dapat mempengaruhi beban penyelesaian perkara.



Gambar 4.1. Grafik Rekapitulasi Capaian Kinerja pada Sasaran Kinerja 1: Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

Berdasarkan hasil monitoring capaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, Capaian Sasaran Kinerja 1 yaitu *"Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern"* mencapai 90,99%. Meskipun mengalami penurunan sebesar 7,33 poin persentase dibandingkan capaian Triwulan I yang mencapai 98,32%, secara umum kinerja masih berada pada kategori baik karena telah melampaui ambang target minimal 90%.

Penurunan capaian tersebut terutama dipengaruhi oleh Indikator Kinerja 1.1 Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu, yang mengalami penurunan cukup signifikan dari 91,58% pada Triwulan I menjadi 54,95% pada Triwulan II. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat perkara yang penyelesaiannya melewati standar waktu yang telah ditetapkan, sehingga memberikan dampak langsung terhadap penurunan rata-rata capaian sasaran kinerja.

Di sisi lain, empat indikator kinerja lainnya menunjukkan capaian yang sangat baik dan konsisten, yaitu:

- 1) Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu;
- 2) Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tepat waktu;
- 3) Persentase putusan yang diunggah pada Direktori Putusan;
- 4) Persentase perkara yang menggunakan e-Court.

Keempat indikator tersebut berhasil mempertahankan capaian 100%, yang menunjukkan bahwa proses administrasi perkara, publikasi putusan, serta implementasi layanan peradilan berbasis elektronik telah berjalan secara optimal sesuai target yang ditetapkan.

Sementara itu, Indikator 1.5 Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara belum dapat dinilai karena tidak terdapat permohonan eksekusi pada periode Triwulan II Tahun 2026, sehingga indikator tersebut tidak memengaruhi perhitungan capaian sasaran kinerja.

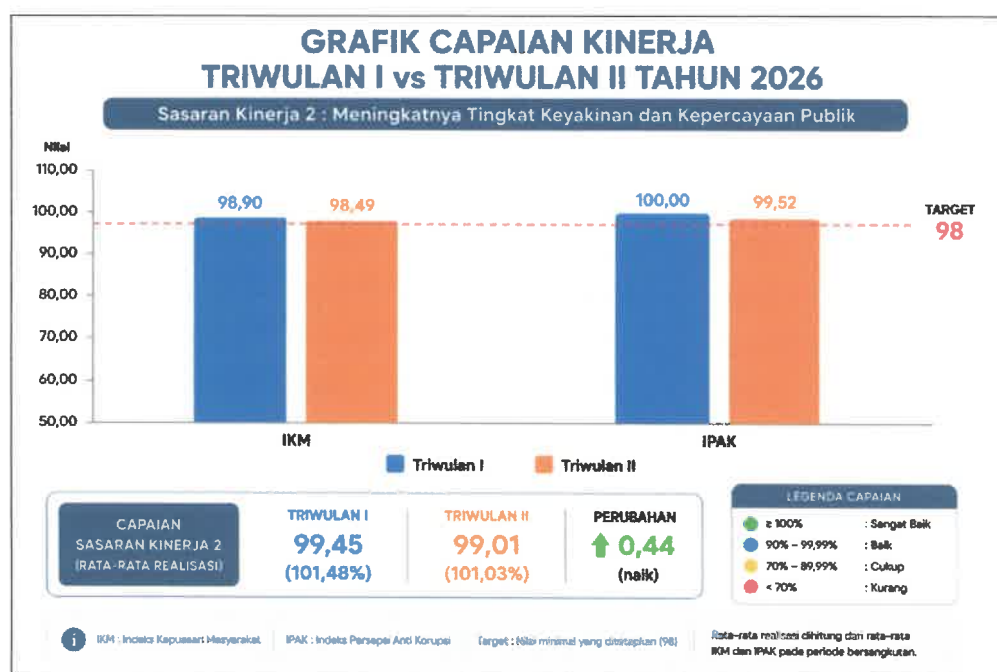
Secara keseluruhan, hasil monitoring menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan. Namun demikian, penurunan pada indikator penyelesaian perkara tepat waktu menjadi perhatian utama yang perlu segera dilakukan evaluasi lebih lanjut. Langkah perbaikan yang dapat dilakukan antara lain melalui peningkatan monitoring terhadap perkara yang mendekati batas waktu penyelesaian, optimalisasi pengendalian melalui rapat monitoring berkala, serta penguatan koordinasi antara Majelis Hakim, Kepaniteraan, dan Kepaniteraan Muda Perkara guna memastikan setiap tahapan penyelesaian perkara berjalan sesuai standar operasional dan target kinerja.

Secara umum, kinerja Triwulan II Tahun 2026 masih menunjukkan kondisi yang baik dengan capaian sasaran sebesar 90,99%. Walaupun terdapat penurunan dibandingkan Triwulan I, penurunan tersebut hanya dipengaruhi oleh satu indikator kinerja, sedangkan indikator lainnya tetap mampu mempertahankan capaian maksimal sebesar 100%. Oleh karena itu, fokus tindak lanjut pada Triwulan III diarahkan pada peningkatan penyelesaian perkara secara tepat waktu tanpa mengurangi kualitas capaian indikator lainnya, sehingga target kinerja tahunan dapat dicapai secara optimal.

D. Analisis Kepuasan Masyarakat

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat sampai dengan Triwulan II tetap berada pada kategori **Sangat Baik**, yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik dapat dipertahankan secara konsisten.

Keberhasilan tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan berbagai inovasi pelayanan, peningkatan kualitas PTSP, serta tindak lanjut terhadap masukan masyarakat. Monitoring terhadap kualitas pelayanan akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya mempertahankan kepercayaan publik terhadap pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.



Gambar 4.3. Grafik Capaian Kinerja Pada Sasaran Kinerja 2: Meningkatnya Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Berdasarkan hasil monitoring kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, Sasaran Kinerja 2 yang bertujuan untuk *Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik* menunjukkan kinerja yang sangat baik. Hal ini tercermin dari rata-rata realisasi sebesar 99,01 terhadap target 98, sehingga menghasilkan Capaian Sasaran Kinerja sebesar 101,03%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan dan persepsi masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang masih berada di atas target kinerja yang telah ditetapkan. Meskipun terdapat sedikit penurunan dibandingkan Triwulan I, capaian pada Triwulan II tetap berada pada kategori Sangat Baik karena melebihi target yang ditetapkan.

Apabila dibandingkan dengan Triwulan I, rata-rata realisasi mengalami penurunan tipis dari 99,45 menjadi 99,01, atau sebesar 0,44 poin. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh sedikit penurunan pada kedua komponen survei, yaitu:

- 1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) turun dari 98,90 menjadi 98,49 (turun 0,41 poin).
- 2) Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) turun dari 100,00 menjadi 99,52 (turun 0,48 poin).

Meskipun demikian, kedua indikator tersebut masih berada di atas target sebesar 98, sehingga tidak berdampak signifikan terhadap pencapaian sasaran kinerja secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan masih mampu memenuhi harapan pengguna layanan, sekaligus mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat yang tetap tinggi terhadap integritas dan profesionalisme aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Secara umum, capaian tersebut mengindikasikan bahwa berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan, transparansi informasi, kemudahan akses layanan, serta penguatan budaya integritas telah berjalan secara efektif. Kondisi ini perlu dipertahankan melalui pelaksanaan evaluasi berkala terhadap hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), serta tindak lanjut atas masukan dan saran dari pengguna layanan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).

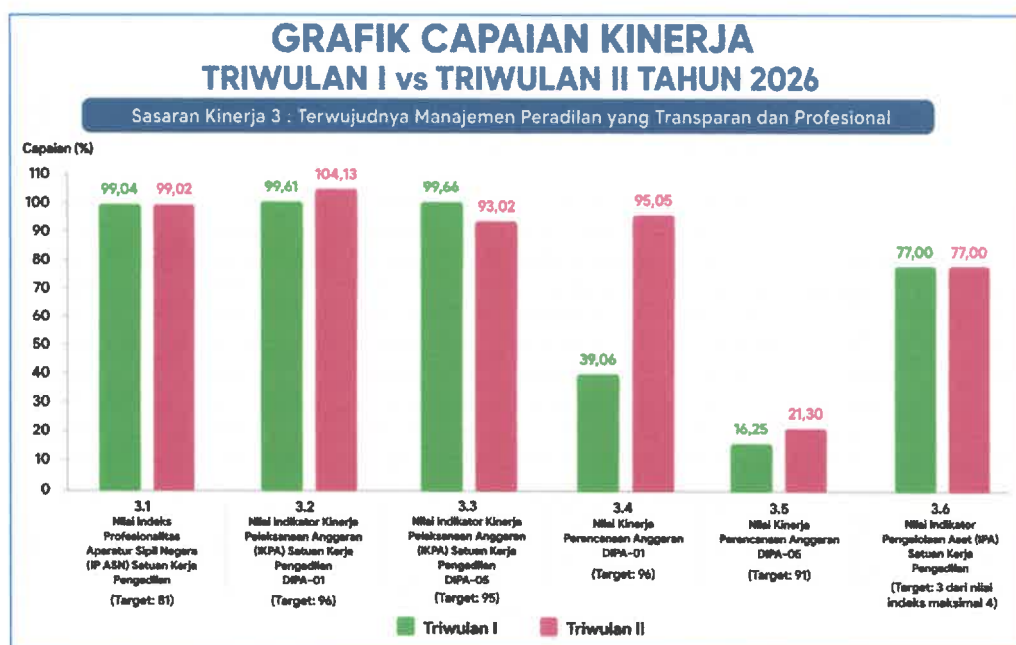
Dari hasil monitoring Triwulan II Tahun 2026, Sasaran Kinerja 2 berhasil tercapai dengan sangat baik. Meskipun terjadi penurunan rata-rata realisasi sebesar 0,44 poin dibandingkan Triwulan I, nilai rata-rata 99,01 masih berada di atas target 98, sehingga menghasilkan tingkat capaian sebesar 101,03%. Dengan demikian, tingkat keyakinan dan kepercayaan publik terhadap pelayanan PTUN Serang tetap terjaga, yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan komitmen terhadap pelayanan prima serta pembangunan integritas telah berjalan secara konsisten.

E. Analisis Kinerja Kesekretariatan

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, pelaksanaan indikator kinerja pada bidang kesekretariatan secara umum menunjukkan kinerja yang baik. Hal tersebut tercermin dari sebagian besar indikator yang telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan, khususnya pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA-01, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA-05, serta Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) yang menunjukkan capaian sesuai dengan tahapan pelaksanaan kinerja.

Di sisi lain, terdapat beberapa indikator yang masih memerlukan perhatian, terutama Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA-05 yang hingga Triwulan II masih berada pada tahap akumulasi progres, serta Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) yang masih memerlukan peningkatan untuk mencapai target indeks yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada bidang kesekretariatan masih memerlukan penguatan pada aspek perencanaan, pengendalian, dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan agar capaian kinerja pada semester II dapat lebih maksimal.

Oleh karena itu, pada Triwulan III diperlukan monitoring yang lebih intensif terhadap indikator-indikator yang capaian kinerjanya belum optimal, disertai percepatan pelaksanaan kegiatan, peningkatan kualitas perencanaan anggaran, serta penguatan pengelolaan aset. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan capaian seluruh indikator kinerja sehingga target kinerja kesekretariatan pada akhir Tahun 2026 dapat tercapai secara optimal.



Gambar 4.2 Grafik Capaian Kinerja Sasaran Kinerja 3: Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, capaian indikator kinerja pada bidang kesekretariatan menunjukkan hasil yang cukup baik. Sebagian besar indikator telah memenuhi target yang ditetapkan, bahkan beberapa di antaranya mengalami peningkatan dibandingkan capaian pada Triwulan I. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa pelaksanaan fungsi pendukung peradilan pada aspek pengelolaan aparatur, pengelolaan anggaran, dan

pengelolaan aset secara umum telah berjalan sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan.

Pada Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN), capaian relatif stabil yaitu dari 99,04 pada Triwulan I menjadi 99,02 pada Triwulan II. Meskipun mengalami penurunan sebesar 0,02 poin, capaian tersebut tetap berada jauh di atas target 81, sehingga menunjukkan bahwa tingkat profesionalitas aparatur tetap terjaga dengan baik.

Indikator Nilai IKPA DIPA-01 menunjukkan perkembangan yang sangat positif dengan peningkatan capaian dari 99,61 menjadi 104,13. Capaian ini melampaui target sebesar 96, yang mengindikasikan semakin optimalnya kualitas pelaksanaan anggaran DIPA-01, baik dari aspek ketepatan penyerapan, kepatuhan administrasi, maupun efektivitas pengelolaan anggaran.

Sebaliknya, Nilai IKPA DIPA-05 mengalami penurunan dari 99,66 menjadi 93,02. Meskipun demikian, capaian tersebut masih berada di atas target 95 dalam hal realisasi indikator pelaksanaan anggaran secara bertahap, namun menunjukkan adanya beberapa komponen penilaian yang perlu mendapatkan perhatian agar kualitas pelaksanaan anggaran DIPA-05 dapat kembali ditingkatkan pada triwulan berikutnya.

Perkembangan yang paling signifikan terlihat pada Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA-01, yang meningkat tajam dari 39,06 pada Triwulan I menjadi 95,05 pada Triwulan II. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan yang sangat baik pada aspek kualitas perencanaan anggaran, termasuk kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan pencapaian output yang menjadi dasar penilaian NKPA.

Sementara itu, NKPA DIPA-05 juga mengalami peningkatan dari 16,25 menjadi 21,30. Walaupun terdapat tren positif, capaian tersebut masih jauh dari target 91, sehingga diperlukan percepatan pelaksanaan kegiatan DIPA-05, khususnya terhadap kegiatan yang output-nya baru akan terealisasi pada semester kedua. Oleh karena itu, monitoring terhadap progres kegiatan dan penyelesaian output perlu terus diperkuat agar nilai NKPA meningkat secara bertahap hingga akhir tahun.

Pada indikator Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA), capaian tetap berada pada nilai 77,00 baik pada Triwulan I maupun Triwulan II. Kondisi ini menunjukkan bahwa belum terdapat peningkatan terhadap kualitas pengelolaan aset selama periode pelaporan. Meskipun nilai indeks dasar masih berada pada 2,31 dari target 3 (skala maksimum 4), capaian tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat beberapa aspek pengelolaan Barang Milik Negara yang perlu ditingkatkan, seperti kelengkapan

administrasi, pemutakhiran data aset, optimalisasi pemanfaatan, serta penyelesaian tindak lanjut hasil monitoring pengelolaan BMN.

Secara keseluruhan, kinerja kesekretariatan pada Triwulan II menunjukkan perkembangan yang positif. Dari enam indikator yang diukur:

- 1) 2 indikator mengalami peningkatan, yaitu IKPA DIPA-01 dan NKPA DIPA-01.
- 2) 2 indikator relatif stabil, yaitu IP ASN dan IPA BMN.
- 3) 2 indikator masih memerlukan perhatian, yaitu IKPA DIPA-05 dan terutama NKPA DIPA-05, yang meskipun menunjukkan peningkatan, namun capaian masih jauh dari target.

Dengan kondisi tersebut, fokus pembinaan pada Triwulan III diarahkan pada percepatan pelaksanaan kegiatan DIPA-05, peningkatan kualitas perencanaan anggaran, serta penguatan tata kelola Barang Milik Negara. Di sisi lain, capaian yang telah baik pada IP ASN, IKPA DIPA-01, dan NKPA DIPA-01 perlu dipertahankan melalui monitoring berkala agar tetap konsisten hingga akhir tahun anggaran.

F. Analisis Risiko dan Pengendalian Kinerja

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Triwulan II, beberapa area yang memerlukan perhatian pada semester II Tahun 2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1. Matrik Analisis Risiko dan Pengendalian Kinerja

Area Pengendalian	Hasil Monitoring	Analisis Evaluasi	Tindak Lanjut
Penyelesaian Perkara Tepat Waktu	Capaian indikator sebesar 54,95% dari target PK	Terjadi penurunan capaian dibandingkan Triwulan I yang berdampak terhadap penurunan capaian Sasaran Kinerja 1. Kondisi ini mengindikasikan masih terdapat perkara yang penyelesaiannya melebihi standar waktu penyelesaian sehingga memerlukan perhatian khusus terhadap proses penyelesaian perkara.	Melaksanakan monitoring berkala terhadap perkara yang mendekati batas waktu penyelesaian, memperkuat koordinasi antara Majelis Hakim dan Kepaniteraan, serta melakukan evaluasi terhadap penyebab keterlambatan sebagai dasar penyusunan langkah perbaikan.
Capaian Sasaran Kinerja 1	Capaian Sasaran Kinerja sebesar 90,99%	Walaupun capaian sasaran masih berada di atas target minimal organisasi, terjadi penurunan dibandingkan Triwulan I akibat belum optimalnya capaian indikator penyelesaian perkara tepat waktu. Indikator pelayanan administrasi perkara	Melakukan evaluasi capaian indikator secara berkala, menyusun rencana aksi perbaikan terhadap indikator yang belum optimal, serta mempertahankan konsistensi capaian indikator lainnya melalui monitoring dan

		lainnya tetap mampu mempertahankan capaian sebesar 100%, sehingga penurunan hanya dipengaruhi oleh satu indikator utama.	pengendalian kinerja secara berkelanjutan.
Pelayanan Publik	Capaian Tingkat Kepuasan dan Kepercayaan Publik sebesar 101,03%	Target telah terlampaui dan kualitas pelayanan tetap berada pada kategori sangat baik. Tantangan utama adalah menjaga konsistensi kualitas pelayanan.	Monitoring tindak lanjut hasil SKM, evaluasi standar pelayanan, serta pengembangan inovasi pelayanan secara berkelanjutan.
Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)	Tren capaian sangat baik	Target masih bersifat moderat dibanding perkembangan capaian sehingga perlu menjadi bahan evaluasi pada penyusunan target berikutnya.	Melakukan reviu target IP ASN pada penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2027 dengan tetap memperhatikan prinsip SMART dan <i>continuous improvement</i> .
Pelaksanaan DIPA 05	Capaian IKPA sebesar 93,02% dari target PK	Pelaksanaan kegiatan masih perlu dipercepat agar target tahunan dapat tercapai secara optimal.	Monitoring progres pelaksanaan kegiatan setiap bulan serta percepatan penyelesaian kegiatan pada semester II.
NKPA DIPA 05	Capaian sebesar 21,30% dari target PK	Capaian masih rendah karena indikator dihitung secara kumulatif berdasarkan perkembangan indikator pembentuk sampai akhir tahun anggaran.	Monitoring capaian RO, penggunaan SBK, efisiensi terhadap pagu SBK, dan indikator pembentuk lainnya secara berkala.
Efisiensi terhadap Pagu SBK	Nilai indikator belum tersedia pada sistem	Proses penghitungan masih berlangsung sehingga evaluasi difokuskan pada perkembangan indikator pembentuk.	Monitoring perkembangan RO, penggunaan SBK, dan kelengkapan data pendukung sampai akhir tahun anggaran.
Pengelolaan Aset (IPA)	Capaian sebesar 77,00% dari target PK	Capaian menunjukkan masih terdapat ruang untuk peningkatan, khususnya pada aspek administrasi, penatausahaan, dan pengelolaan Barang Milik Negara agar target tahunan dapat tercapai secara optimal.	Meningkatkan monitoring administrasi BMN, melaksanakan inventarisasi secara berkala, serta memastikan ketepatan dan kelengkapan data pengelolaan aset.
Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)	Tren capaian sangat baik	Target masih bersifat moderat dibanding perkembangan capaian sehingga perlu menjadi bahan evaluasi pada penyusunan target berikutnya.	Melakukan reviu target IP ASN pada penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2027 dengan tetap memperhatikan prinsip SMART dan <i>continuous improvement</i> .

G. Proyeksi Kinerja Triwulan III

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sampai dengan Triwulan II, prospek pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2026 berada pada kategori baik. Sebagian besar

indikator menunjukkan tren yang positif dan memiliki peluang besar untuk mencapai target tahunan.

Fokus pengendalian pada Triwulan III diarahkan pada percepatan pelaksanaan kegiatan DIPA 05, peningkatan capaian Rincian Output (RO), pemantauan perkembangan indikator pembentuk NKPA, monitoring terhadap komponen pembentuk efisiensi SBK, serta mempertahankan capaian pelayanan publik dan profesionalitas aparatur.

Dengan pelaksanaan monitoring bulanan, evaluasi triwulanan, dan tindak lanjut yang konsisten, diharapkan seluruh indikator kinerja dapat mencapai target tahunan secara optimal serta semakin memperkuat budaya perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

BAB V

PERMASALAHAN, HAMBATAN, TINDAK LANJUT DAN RENCANA AKSI

A. Permasalahan dan Hambatan

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Triwulan II Tahun 2026, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kondisi yang memerlukan perhatian sebagai bagian dari upaya pengendalian kinerja dan peningkatan kualitas pelaksanaan Perjanjian Kinerja.

Permasalahan yang diidentifikasi tidak seluruhnya merupakan bentuk ketidaktercapaian target, namun juga mencerminkan kondisi yang memerlukan pengendalian lebih lanjut agar tidak memengaruhi pencapaian sasaran strategis pada akhir Tahun 2026. Adapun permasalahan dan hambatan yang menjadi perhatian adalah sebagai berikut:

1. **Pelaksanaan kegiatan DIPA 05** masih berlangsung sehingga sebagian Rincian Output (RO) belum mencapai perkembangan yang optimal pada Triwulan II.
2. **Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)** belum dapat menggambarkan capaian akhir karena merupakan indikator yang dihitung secara kumulatif berdasarkan perkembangan indikator pembentuk hingga akhir tahun anggaran.
3. **Indikator Efisiensi terhadap Pagu Standar Biaya Keluaran (SBK)** pada DIPA 05 belum tersedia pada aplikasi karena proses penghitungan masih berlangsung sesuai mekanisme sistem.
4. **Target Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)** menunjukkan prospek ketercapaian yang sangat baik, namun berdasarkan hasil monitoring masih terdapat ruang untuk penyempurnaan kualitas penetapan target pada periode perencanaan berikutnya.
5. **Konsistensi kualitas pelayanan publik dan pelayanan peradilan** perlu terus dipertahankan agar capaian indikator yang telah baik tetap terjaga hingga akhir tahun.

B. Upaya Perbaikan dan Pengendalian

Menindaklanjuti hasil Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Triwulan II Tahun 2026, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang akan melaksanakan berbagai langkah perbaikan dan pengendalian sebagai upaya meningkatkan ketercapaian sasaran strategis organisasi pada Triwulan III dan akhir Tahun 2026, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan monitoring terhadap penyelesaian perkara secara tepat waktu melalui pemantauan berkala terhadap perkara yang mendekati batas waktu penyelesaian, evaluasi terhadap perkara yang berpotensi mengalami keterlambatan, serta penguatan koordinasi antara Majelis Hakim dan Kepaniteraan untuk menjaga ketercapaian Sasaran Kinerja 1.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian indikator Perjanjian Kinerja secara berkala melalui rapat evaluasi bulanan dan triwulanan sebagai dasar pengambilan keputusan, penyusunan rencana aksi, serta percepatan penyelesaian kegiatan yang masih memerlukan perhatian.
3. Mengoptimalkan pelaksanaan anggaran DIPA-05 melalui percepatan pelaksanaan kegiatan, penyelesaian administrasi anggaran secara tepat waktu, dan pengendalian terhadap realisasi output agar target IKPA dapat tercapai pada akhir tahun anggaran.
4. Memperkuat pengendalian terhadap Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) dengan melakukan monitoring secara berkala terhadap seluruh komponen pembentuk NKPA, meliputi perkembangan Rincian Output (RO), penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK), efisiensi terhadap pagu SBK, serta komponen penilaian lainnya guna mendukung peningkatan nilai NKPA secara bertahap.
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) melalui inventarisasi, penatausahaan, pemutakhiran data aset, serta penyelesaian tindak lanjut hasil monitoring BMN secara berkala dalam rangka meningkatkan capaian Indikator Pengelolaan Aset (IPA).
6. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui evaluasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), tindak lanjut atas masukan pengguna layanan, serta pengembangan inovasi pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
7. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kompetensi aparatur secara berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemutakhiran data kepegawaian, serta penguatan profesionalitas ASN guna mempertahankan capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN).
8. Memperkuat sistem pengendalian kinerja organisasi melalui optimalisasi monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut atas seluruh rekomendasi hasil monitoring, sehingga setiap unit kerja memiliki informasi kinerja yang memadai sebagai dasar perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dan pencapaian sasaran strategis organisasi.

C. Rencana Aksi Peningkatan Kinerja Triwulan III

Sebagai tindak lanjut atas hasil Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Triwulan II Tahun 2026, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyusun Rencana Aksi Peningkatan Kinerja Triwulan III sebagai pedoman pelaksanaan pengendalian dan percepatan pencapaian target kinerja sampai dengan akhir Tahun 2026. Rencana aksi ini disusun berdasarkan hasil analisis terhadap indikator yang masih memerlukan perhatian, sehingga diharapkan mampu menjaga ketercapaian sasaran strategis organisasi.

Tabel 5.1 Matrik Rencana Aksi Peningkatan Kinerja Triwulan III

No	Indikator/Area Pengendalian	Permasalahan/Hasil Monitoring	Rencana Aksi Triwulan III	Penanggung Jawab	Output yang Diharapkan
1	Penyelesaian Perkara Tepat Waktu	Capaian indikator baru mencapai 54,95% sehingga berdampak terhadap penurunan capaian Sasaran Kinerja 1.	Melaksanakan monitoring mingguan terhadap perkara yang mendekati batas waktu penyelesaian, melakukan evaluasi perkara yang berpotensi terlambat, serta memperkuat koordinasi antara Majelis Hakim dan Kepaniteraan.	Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Majelis Hakim	Peningkatan persentase penyelesaian perkara tepat waktu dan peningkatan capaian Sasaran Kinerja 1
2	IKPA DIPA 05	Capaian indikator sebesar 93,02%, masih memerlukan perhatian agar target tahunan tercapai.	Melaksanakan monitoring pelaksanaan anggaran secara berkala serta mempercepat penyelesaian kegiatan sesuai jadwal.	Sekretaris, PPK dan PPTK	Peningkatan capaian IKPA pada Triwulan III.
3	NKPA DIPA 05	Capaian baru mencapai 21,30%. Nilai tersebut masih rendah karena perkembangan Rincian Output (RO) belum optimal, indikator Efisiensi terhadap Pagu SBK belum terbentuk pada sistem, serta komponen	Melakukan percepatan penyelesaian output kegiatan, monitoring perkembangan RO, memastikan kelengkapan data penggunaan dan efisiensi SBK, serta evaluasi berkala terhadap seluruh komponen	Kasubag PTIP, PPK, PPSPM dan Operator SAKTI	Peningkatan nilai NKPA DIPA-05 beserta seluruh indikator pembentuknya.

		pembentuk NKPA lainnya masih berkembang secara kumulatif hingga akhir tahun anggaran.	pembentuk NKPA agar target akhir tahun dapat tercapai.		
4	Pengelolaan Aset (IPA)	Capaian sebesar 77,00% , masih memerlukan perhatian untuk mencapai target tahunan.	Melaksanakan inventarisasi BMN, penertiban administrasi aset, serta monitoring pengelolaan BMN secara berkala.	Subbagian Umum dan Keuangan	Peningkatan kualitas pengelolaan BMN dan capaian IPA.
7	Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)	Tren capaian sangat baik dan berpotensi melampaui target.	Mempertahankan pembinaan aparatur serta melakukan reviu terhadap target IP ASN sebagai bahan penyusunan Perjanjian Kinerja tahun berikutnya.	Sekretaris dan Subbagian Kepegawaian	Ketercapaian target IP ASN serta penyempurnaan target tahun berikutnya.
8	Tingkat Kepuasan dan Kepercayaan Publik	Capaian indikator telah melampaui target (101,03%).	Mempertahankan kualitas pelayanan, menindaklanjuti hasil SKM, dan mengembangkan inovasi pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.	Panitera, Sekretaris, dan PTSP	Kualitas pelayanan tetap terjaga dan kepercayaan publik meningkat.

D. Rekomendasi

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Triwulan II Tahun 2026, secara umum pelaksanaan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menunjukkan perkembangan yang baik. Sebagian besar indikator kinerja telah mencapai target yang ditetapkan, sementara beberapa indikator lainnya masih memerlukan perhatian dan penguatan agar target tahunan dapat dicapai secara optimal.

Sehubungan dengan hal tersebut, disusun rekomendasi sebagai arahan strategis bagi pimpinan dan unit kerja terkait dalam rangka meningkatkan efektivitas pengendalian kinerja, mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan, serta mendorong perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*). Rekomendasi ini

diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan tindak lanjut dan pengambilan kebijakan pada Triwulan III maupun dalam penyusunan kebijakan kinerja pada periode berikutnya.

Adapun rekomendasi dimaksud disajikan dalam matriks sebagai berikut.

Tabel 5.2. Matriks Rekomendasi Peningkatan Kinerja Berdasarkan Hasil Monitoring dan Evaluasi Triwulan II Tahun 2026

No	Area Kinerja	Rekomendasi Strategis	Ditujukan Kepada	Tujuan
1	Penyelesaian Perkara Tepat Waktu	Meningkatkan monitoring terhadap penyelesaian perkara melalui evaluasi berkala terhadap perkara yang mendekati batas waktu penyelesaian, memperkuat koordinasi antara Majelis Hakim dan Kepaniteraan, serta menyusun langkah percepatan terhadap perkara yang berpotensi terlambat.	Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Majelis Hakim	Meningkatkan persentase penyelesaian perkara tepat waktu serta mengembalikan capaian Sasaran Kinerja 1 sesuai target Perjanjian Kinerja.
2	Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Mempertahankan kualitas pelaksanaan anggaran DIPA-01 serta meningkatkan monitoring dan percepatan penyelesaian kegiatan DIPA-05 agar seluruh komponen penilaian IKPA dapat dipenuhi secara optimal sampai akhir tahun anggaran.	Sekretaris, PPK, PPSPM dan PPTK	Menjaga capaian IKPA tetap berada pada kategori sangat baik dan mencapai target akhir tahun.
3	Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)	Memperkuat monitoring terhadap seluruh indikator pembentuk NKPA melalui percepatan penyelesaian Rincian Output (RO), pemantauan penggunaan dan efisiensi SBK, serta evaluasi berkala terhadap perkembangan komponen pembentuk NKPA.	Sekretaris, Kasubbag PTIP, PPK, PPSPM	Meningkatkan capaian NKPA secara bertahap hingga mencapai target pada akhir Tahun Anggaran 2026.
4	Pengelolaan Barang Milik Negara (IPA)	Meningkatkan kualitas pengelolaan BMN melalui inventarisasi, penatausahaan, pemutakhiran data aset, penyelesaian tindak lanjut hasil monitoring BMN, serta optimalisasi pemanfaatan aset secara berkala.	Kasubbag Umum dan Keuangan	Meningkatkan nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) dan kualitas tata kelola BMN.

5	Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)	Mempertahankan capaian IP ASN melalui pengembangan kompetensi aparatur, pemutakhiran data ASN, serta melakukan reviu terhadap target IP ASN pada penyusunan Perjanjian Kinerja tahun berikutnya dengan memperhatikan prinsip SMART dan <i>continuous improvement</i> .	Sekretaris dan Subbagian Kepegawaian	Mempertahankan profesionalitas ASN sekaligus meningkatkan kualitas penetapan target kinerja tahun berikutnya.
6	Tingkat Kepuasan dan Kepercayaan Publik	Mempertahankan kualitas pelayanan publik melalui tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), pengembangan inovasi pelayanan, serta evaluasi standar pelayanan secara berkala.	Panitera, Sekretaris, PTSP dan Tim Survei	Menjaga serta meningkatkan tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pengadilan.
7	Pengendalian Kinerja Organisasi	Memperkuat pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala melalui rapat evaluasi bulanan dan triwulanan, pemanfaatan dashboard monitoring kinerja, serta memastikan seluruh rencana aksi dan rekomendasi hasil evaluasi ditindaklanjuti tepat waktu.	Ketua, Panitera, Sekretaris dan seluruh Penanggung Jawab IKU	Menjamin ketercapaian sasaran strategis, meningkatkan efektivitas pengendalian internal, dan mendukung perbaikan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 merupakan bagian dari mekanisme pengendalian intern yang dilaksanakan secara berkesinambungan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk memastikan ketercapaian sasaran strategis organisasi, meningkatkan akuntabilitas kinerja, serta mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data. Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, perkembangan pelaksanaan program, kegiatan, dan indikator kinerja dapat diidentifikasi secara objektif sehingga menjadi dasar dalam penyusunan langkah-langkah perbaikan pada periode berikutnya.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, secara umum pelaksanaan Perjanjian Kinerja menunjukkan hasil yang baik. Sasaran Kinerja 1 memperoleh capaian sebesar 90,99%, meskipun mengalami penurunan dibandingkan Triwulan I akibat belum optimalnya indikator *Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu*. Sementara itu, Sasaran Kinerja 2 memperoleh capaian sebesar 101,03%, yang menunjukkan bahwa tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tetap berada di atas target yang telah ditetapkan. Pada Sasaran Kinerja 3, sebagian besar indikator bidang kesekretariatan juga menunjukkan perkembangan yang positif, khususnya pada IKPA DIPA-01 dan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA-01 yang mengalami peningkatan dibandingkan Triwulan I, sedangkan beberapa indikator lainnya masih memerlukan optimalisasi untuk mencapai target akhir tahun.

Hasil evaluasi juga mengidentifikasi beberapa area yang memerlukan perhatian pada Triwulan III, yaitu peningkatan penyelesaian perkara secara tepat waktu, percepatan pelaksanaan kegiatan DIPA-05, penguatan pengendalian terhadap seluruh komponen pembentuk Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA), serta peningkatan kualitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dalam rangka mendukung peningkatan nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA). Di samping itu, capaian yang telah berada pada kategori sangat baik, seperti Indeks Profesionalitas

ASN (IP ASN) dan Tingkat Kepuasan dan Kepercayaan Publik, perlu dipertahankan melalui pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya *continuous improvement*.

Dengan demikian, pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Triwulan II tidak hanya memberikan gambaran mengenai tingkat ketercapaian indikator kinerja, tetapi juga menghasilkan identifikasi risiko, rencana aksi perbaikan, serta rekomendasi strategis yang menjadi dasar pengendalian kinerja pada Triwulan III. Melalui pendekatan tersebut, proses monitoring dan evaluasi diharapkan mampu memperkuat budaya kinerja, meningkatkan efektivitas pengelolaan organisasi, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

B. Penutup

Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian sasaran strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang selama Semester I Tahun 2026. Selain menjadi media pelaporan, dokumen ini juga berfungsi sebagai instrumen manajemen yang memberikan informasi mengenai capaian kinerja, hambatan yang dihadapi, analisis risiko, serta langkah-langkah perbaikan yang perlu dilaksanakan pada periode berikutnya.

Seluruh hasil monitoring, analisis risiko, rencana aksi peningkatan kinerja, dan rekomendasi strategis yang telah disusun dalam laporan ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan pengendalian kinerja pada Triwulan III. Setiap unit kerja diharapkan melaksanakan tindak lanjut secara konsisten sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga berbagai area yang masih memerlukan perbaikan dapat segera ditangani dan target kinerja tahunan dapat dicapai secara optimal.

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berkomitmen untuk terus memperkuat sistem akuntabilitas kinerja melalui peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, monitoring, evaluasi, serta tindak lanjut hasil evaluasi secara berkesinambungan. Penguatan koordinasi antarunit kerja, optimalisasi pemanfaatan data kinerja, dan penerapan prinsip *continuous improvement* diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan organisasi sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pada akhirnya, hasil Monitoring dan Evaluasi Triwulan II Tahun 2026 diharapkan tidak hanya menjadi dokumen pelaporan, tetapi juga menjadi dasar dalam membangun budaya kinerja yang berorientasi pada hasil (*results-oriented performance*), pengambilan keputusan yang berbasis data (*evidence-based decision making*), serta peningkatan kualitas pelayanan peradilan secara berkelanjutan sesuai dengan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

L A M P I R A N

**MONITORING REALISASI KINERJA SAKIP KEPANITERAAN TRIWULANAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG TAHUN 2026**

Tujuan 1: Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja		Target (%)	REALISASI KINERJA TRIWULAN II							
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1)	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	91	Jumlah perkara yang diselesaikan	A P R I L	1	M E I	n/a	J U N I	6	
					Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu		0		n/a		6	
					Realisasi		0		n/a		100	
		2)	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	Jumlah perkara yang diputus		1		n/a		6	
					Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu		1		n/a		6	
					Realisasi		100		n/a		100	
		3)	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	Jumlah petikan atau amar putusan banding,kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju		2		6		2	
					Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding,kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu		2		6		2	
					Realisasi		100		100		100	
		4)	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	Jumlah putusan yang telah diminutasi		1		n/a		6	
					Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan		1		n/a		6	
					Realisasi		100		n/a		100	
		5)	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	90	Jumlah putusan tata usaha negara yang dimohonkan eksekusi		n/a		n/a		n/a	
					Jumlah permohonan eksekusi putusan tata usaha negara yang diselesaikan		n/a		n/a		n/a	
					Realisasi		n/a		n/a		n/a	
		6)	Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100	Jumlah perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan		1		1		7	
					Jumlah perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Court		1		1		7	
					Realisasi		100		100		100	
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1)	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	98	IKM =====>	98,49		99,01	101,03			
					IPAK =====>	99,52						

Serang, 28 Juli 2026

Panitera,

ASWIRMAN, S.H. M.H.

NIP. 19720715 199203 1 003

REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2026

Sasaran Kinerja 1: Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			Rata-Rata Realisasi	Capaian	Capaian SasKin 1
			Apr	Mei	Jun			
1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	91	0	n/a	100	50,00	54,95	90,99
1.2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	100	100	n/a	100,00	100,00	
1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100	100	100,00	100,00	
1.4	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	n/a	100	100,00	100,00	
1.5	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	90	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
1.6	Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100	100	100	100	100,00	100,00	

Sasaran Kinerja 2: Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		Rata-Rata Realisasi	Capaian SasKin 2
			Triwulan II			
2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	98	IKM	98,49	99,01	101,03
			IPAK	99,52		



Serang, 28 Juli 2026

Panitera,

ASWIRMAN, S.H. M.H.

NIP. 19720715 199203 1 003

**MONITORING REALISASI KINERJA SAKIP KESEKRETARIATAN TRIWULANAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG TAHUN 2026**

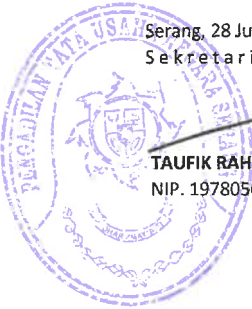
Tujuan ke-2 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern dan Profesional

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Triwulan II							Nilai Realisasi adalah nilai pelaporan bulan terakhir	Capaian	Status		
				Nilai Aspek & Indikator Aspek		April		Mei		Juni					
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	81	Kualifikasi		23,39	Nilai IPASN April 80,54	23,39	Nilai IPASN Mei 80,54	23,13	Nilai IPASN Juni 80,21	80,21	99,02	Stabil dan Mendekati Target
					Kompetensi		29,46		29,46		29,79				
					Kinerja		24,11		24,11		23,96				
					Disiplin		5		5		5				
		3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA-01	96	Kualitas Perencanaan Anggaran	Revisi DIPA	100,00	Nilai IKPA April 95,24	100,00	Nilai IKPA Mei 99,96	100,00	Nilai IKPA Juni 99,96	99,96	104,13	Target Terlampaui (Sangat Baik)
						Deviasi Hal Ili DIPA	100,00		100,00		100,00				
					Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Penyerapan Anggaran	98,11		99,06		99,82				
						Belanja Kontraktual	100,00		100,00		100,00				
						Penyelesaian Tagihan	100,00		100,00		100,00				
						Pengelolaan UP & TUP	99,96		99,97		99,98				
						Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Capaian Output		82,50		100,00				
					Dispensasi SPM (Pengurangan)		0,00		0,00		0,00				
		3.3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA-05	95	Kualitas Perencanaan Anggaran	Revisi DIPA	100,00	Nilai IKPA April 88,28	100,00	Nilai IKPA Mei 90,10	100,00	Nilai IKPA Juni 88,37	88,37	93,02	Sesuai Target Tahapan, Memerlukan Percepatan Semester II
						Deviasi Hal II DIPA	100,00		87,13		79,42				
					Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Penyerapan Anggaran	74,71		79,51		84,97				
						Belanja Kontraktual	n/a		n/a		n/a				
						Penyelesaian Tagihan	100		100,00		100,00				
						Pengelolaan UP & TUP	81,32		95,66		90,46				
						Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Capaian Output		81,51		90,20				
					Dispensasi SPM (Pengurangan)		0,00		0,00		0,00				
		3.4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA-01	96	Efektivitas	Capaian Rincian Output	50,00	Nilai NKPA April 37,50	65,00	Nilai NKPA Mei 63,75	75,00	Nilai NKPA Mar 81,25	91,25	95,05	Baik (On Track)
						Penggunaan SBK	0,00		100,00		100,00				
					Efisiensi	Efisiensi SBK	n/a		n/a		100,00				
		3.5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA-05	91	Efektivitas	Capaian Rincian Output	12,50	Nilai NKPA April 14,79	12,50	Nilai NKPA Mei 16,72	12,50	Nilai NKPA Juni 19,38	19,38	21,30	Tahap Akumulasi Progres Berkelanjutan
						Penggunaan SBK	100,00		100,00		100,00				
					Efisiensi	Efisiensi SBK	n/a		n/a		n/a				

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Triwulan II								Nilai Realisasi adalah nilai pelaporan bulan terakhir	Capaian	Status	
				Nilai Aspek & Indikator Aspek		April		Mei		Juni					
		3.6	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	Pengelolaan BMN yang Akuntabel & Produktif	Penatausahaan BMN	0,80	Nilai IPA April 2,31	0,80	Nilai IPA Mei 2,31	0,80	Nilai IPA Juni 2,31	2,7	90,00	Tahap Penguatan Pengelolaan BMN
				Realisasi PNBP dari Pengelolaan Aset	0,37	0,37	0,37								
				Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap Peraturan Perundang-Undangan	0,14	0,14	0,14								
				Pengawasan dan Pengendalian BMN yang Efektif	0,30	0,30	0,30								
				Administrasi BMN yang Andal	0,70	0,70	0,70								

Serang, 28 Juli 2026
Sekretaris,

TAUFIK RAHMAN, S.Sos., M.M.
NIP. 19780509 200604 1 002



**REKAPITULASI MONITORING REALISASI KINERJA SAKIP KESEKRETARIATAN TRIWULANAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG TAHUN 2026**

Tujuan ke-2 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern dan Profesional

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target (%)	Nilai Realisasi adalah nilai pelaporan bulan terakhir	Capaian
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	81	80,21	99,02
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA-01	96	99,96	104,13
		3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA-05	95	88,37	93,02
		3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA-01	96	91,25	95,05
		3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA-05	91	19,38	21,30
		3.6 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	2,31	77,00



Serang, 28 Juli 2026
Sekretaris,

TAUFIK RAHMAN, S.Sos., M.M.
NIP. 19780509 200604 1 002

**LAPORAN MONITORING RENCANA AKSI
BERDASARKAN RENCANA AKSI LAPORAN MONEV CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2026
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Tahun 2026**

Monitoring terhadap pelaksanaan Rencana Aksi berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dilaksanakan pada periode Triwulan II Tahun 2026. Monitoring ini bertujuan untuk memastikan bahwa rekomendasi dan tindak lanjut atas hasil evaluasi Triwulan I telah dilaksanakan secara efektif, sehingga target kinerja yang belum optimal dapat segera diperbaiki dan dipenuhi sesuai rencana yang telah ditetapkan. Adapun perkembangan pelaksanaan tindak lanjut tersebut disajikan pada tabel berikut.

No	Rencana Aksi	Target	Hasil Monitoring Triwulan II	Tindak Lanjut
1	Percepatan pelaksanaan kegiatan prioritas	Meningkatnya capaian RO	DIPA 01 menunjukkan capaian RO yang telah optimal dengan nilai 75,00, menunjukkan bahwa pelaksanaan output kegiatan telah berjalan sesuai target. Sementara itu pada DIPA 05, capaian RO masih sebesar 12,50, sehingga pelaksanaan kegiatan prioritas masih perlu dioptimalkan agar target output dapat tercapai pada triwulan berikutnya.	Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan pada DIPA 05, mempercepat realisasi output serta melakukan monitoring secara berkala terhadap progres kegiatan.
2	Monitoring bulanan IKPA dan NKPA	Peningkatan nilai indikator	Nilai IKPA Triwulan II mencapai 99,96 pada DIPA 01 sehingga termasuk kategori sangat baik. Pada DIPA 05 nilai IKPA mencapai 88,37, yang masih memerlukan peningkatan. Berdasarkan aplikasi NKPA, nilai NK Perencanaan Anggaran DIPA 01 sebesar 56,25, sedangkan DIPA 05 sebesar 19,38 sehingga masih perlu dilakukan penyempurnaan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran.	Melakukan evaluasi terhadap indikator NKPA yang masih rendah, memperbaiki kualitas perencanaan anggaran serta meningkatkan ketepatan pelaksanaan kegiatan pada kedua DIPA, khususnya DIPA 05.
3	Penguatan pengendalian penyelesaian perkara	Stabilitas capaian layanan	Pengendalian penyelesaian perkara terus dilakukan melalui monitoring penyelesaian perkara tepat waktu sehingga pelayanan peradilan tetap berjalan sesuai standar yang ditetapkan.	Monitoring berkala terhadap perkara yang mendekati batas waktu penyelesaian serta evaluasi terhadap kendala penyelesaian perkara.

No	Rencana Aksi	Target	Hasil Monitoring Triwulan II	Tindak Lanjut
4	Optimalisasi penggunaan anggaran	Peningkatan efisiensi SBK	Pada DIPA 05, indikator Penggunaan SBK telah muncul pada sistem dengan nilai 100,00 , sedangkan indikator Efisiensi SBK masih belum muncul . Untuk DIPA 01, indikator penggunaan maupun efisiensi SBK masih belum tersedia pada sistem sehingga belum dapat dilakukan evaluasi secara menyeluruh.	Melakukan koordinasi dengan unit terkait dan memonitor pembaruan data pada aplikasi sehingga indikator Efisiensi SBK dapat dimonitor secara optimal.
5	Penguatan layanan berbasis digital	Peningkatan kepuasan publik	Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (IKM), tingkat kepuasan pengguna layanan mencapai 99,01 , menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik berada pada kategori sangat baik.	Mempertahankan kualitas pelayanan digital serta menindaklanjuti saran dan masukan pengguna layanan untuk peningkatan berkelanjutan.
6	Monitoring pengelolaan BMN	Peningkatan nilai IPA	Monitoring pengelolaan BMN telah dilaksanakan secara berkala sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas pengelolaan aset negara.	Melakukan inventarisasi dan rekonsiliasi BMN secara berkala serta memastikan seluruh transaksi BMN tercatat dengan baik.
7	Penguatan pengendalian internal	Mitigasi risiko kinerja	Pengendalian internal terus dilaksanakan melalui monitoring pelaksanaan program kerja, evaluasi risiko, serta pengawasan terhadap pencapaian indikator kinerja organisasi.	Melakukan evaluasi berkala terhadap risiko yang berpotensi mempengaruhi pencapaian target kinerja serta memastikan tindak lanjut atas hasil monitoring.

Mengetahui,
Sekretaris



TAUFIK RAHMAN, S.Sos., M.M.
NIP. 19780509 200604 1 002



Serang, 10 Juli 2026
Disiapkan oleh,
Kasubbag PTIP



MASURI
NIP. 19800808 200912 1 002